



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ASEAN DAN PENYELESAIAN KRISIS MYANMAR

Ziyad Falahi

Analisis Legislatif Ahli Pertama
ziyad.falahi@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Upaya ASEAN mengatasi krisis Myanmar mengalami ujian setelah sembilan negara anggota ASEAN menerima surat dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand, Don Pramudwinai, untuk melangsungkan pertemuan dengan Myanmar pada 18 hingga 19 Juni 2023. Sebelumnya, hanya Menlu Kamboja Prak Sokhonn yang telah mengonfirmasi melalui media akan menghadiri pertemuan dengan menyatakan kesediaan untuk hadir. Dalam realisasinya, pada pertemuan yang berlangsung dua hari itu, hanya dihadiri oleh Menlu Don Pramudwinai dan Menlu Myanmar yang ditunjuk junta militer, Than Swe.

Sikap Thailand bertolak belakang dengan negara ASEAN lain. Kritik terhadap inisiatif Thailand bukan hanya karena undangan kepada negara ASEAN lainnya baru disampaikan empat hari menjelang tanggal pertemuan, tetapi pertemuan itu berisiko melegitimasi pemerintah militer Myanmar dan tidak pantas dikarenakan peran Thailand yang terlalu besar dapat membawa nama ASEAN. Pertemuan itu berada di luar inisiatif resmi perdamaian ASEAN yang dikenal sebagai "Konsensus Lima Poin". Pandangan lain mempertanyakan, mengapa Thailand menyerukan pembicaraan sekarang, padahal pada Agustus 2023 pemerintah militer Myanmar berencana akan mengadakan pemilihan umum baru. Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, berjanji akan mengadakan pemilihan yang bebas dan adil setelah mencabut keadaan darurat pada Agustus 2023. Jika pemilu Agustus 2023 berjalan secara demokratis, bukan tidak mungkin pemilu di Myanmar nanti akan dimenangkan oleh partai-partai progresif dan populis.

Kembali ke pertemuan Thailand soal Myanmar, anggota ASEAN lainnya telah menolak undangan Thailand, termasuk Indonesia, yang menjadi ketua ASEAN tahun ini. Di sisi lain, Nantiwat Samart, Sekretaris Menlu Thailand mengatakan, pembicaraan ini bertujuan agar Myanmar tidak boleh diisolasi atau disingkirkan dari ASEAN. Sementara itu, Menlu Singapura Vivian Balakrishnan mengatakan, terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta di tingkat tinggi atau bahkan menteri. Sebelumnya, pemerintah Vietnam mengatakan menlunya tidak akan hadir, begitu juga dengan Malaysia. Sementara Filipina tidak memberikan komentar apapun.

Tidak hanya ASEAN yang tidak memberi legitimasi atas pertemuan Menlu Thailand dan Menlu Junta Militer. Pihak oposisi Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar (NUG), yang terdiri dari loyalis pemerintahan Aung Sang Suu Kyi yang digulingkan, mengutuk inisiatif Thailand tersebut. Kelompok oposisi berpandangan, mengundang junta tidak sah ke diskusi ini karena tidak akan berkontribusi pada penyelesaian krisis politik Myanmar. Sebanyak 81 kelompok aktivis Myanmar merilis surat terbuka pada hari Minggu mengutuk "inisiatif rahasia". Mereka mengatakan, pembicaraan itu "kontradiksi terang-terangan" dengan kebijakan ASEAN yang tidak mengundang pejabat junta ke pertemuan tingkat tinggi.

Jenderal Myanmar telah dilarang selama hampir dua tahun dari pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Mereka dianggap telah gagal menghormati kesepakatan untuk memulai pembicaraan dengan pemerintahan sipil yang digulingkan. Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan

bahwa persoalan Myanmar yang berdampak langsung ke negaranya masih dikondisikan oleh pemerintahan militer. Sebab, pengungsi Myanmar datang ke Thailand lewat perbatasan. Thailand ingin krisis di Myanmar selesai secepat mungkin karena menjadi negara yang paling terdampak bila krisis berkepanjangan. Dengan kata lain, sedapat mungkin Thailand harus membangun komunikasi dengan Myanmar untuk menggali informasi demi keamanan regional.

Dalam lima bulan keketuaan di ASEAN, Indonesia telah melakukan lebih dari 75 pendekatan dengan berbagai pihak di Myanmar. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya melakukan antisipasi terhadap pertemuan Thailand tersebut. Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan, dua kemungkinan dibalik keputusan pertemuan tersebut. *Pertama*, ada masalah koordinasi yang cukup serius; dan *kedua*, ada keretakan dalam tubuh ASEAN mengenai cara menangani krisis di internal ASEAN. Kedua hal tersebut akan berdampak pada implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) yang secara jelas memuat proses, cara, dan tujuannya. Dino menuturkan kedua masalah tersebut harus segera diatasi. Koordinasi antara Thailand sebagai penyelenggara pertemuan dan Indonesia sebagai Ketua ASEAN perlu dilakukan pada tahun 2023 ini.

Atensi DPR

Krisis Myanmar menjadi ujian bagi keketuaan Indonesia di ASEAN. Selama menjabat Ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia telah melakukan pendekatan ke hampir semua pihak, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) pemerintah junta militer serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) oposisi Myanmar. Melalui fungsi pengawasan, Komisi I DPR perlu ikut mencermati perkembangan politik yang terjadi di Myanmar dan upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis Myanmar, terutama melalui implementasi Konsensus Lima Poin. Konsensus tersebut, antara lain, menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, dan mengizinkan pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.

Dalam posisinya sebagai Ketua ASEAN *Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA) tahun 2023, DPR RI perlu mengajak parlemen negara-negara ASEAN untuk memperkuat langkah bersama dalam mendukung terwujudnya stabilitas, perdamaian, dan kehidupan demokrasi yang sejalan dengan harapan masyarakat di Myanmar. Penyelesaian krisis Myanmar harus mendapat perhatian dan menjadi prioritas dalam keketuaan Indonesia di ASEAN dan juga AIPA pada tahun 2023 karena hal ini berkaitan dengan stabilitas kawasan.

Sumber

antaranews.com., 19 Juni 2023;

Kompas, 22 Juni 2023;

metronews.com., 22 Juni 2023; dan

tempo.co., 20 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

@anlegbkdoofficial

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.